



Inventarisasi dan Penilaian Sumber Daya Pendukung untuk Pengembangan Desa Wisata

Hasddin^{1*}, Jamal Mukaddas², Tri Astuti³, Safril Kasim⁴, Jasman⁵

^{1,2} Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Lakidende, Unaaha, Indonesia

³ Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

⁴ Jurusan Ilmu Lingkungan, Universitas Halu Oleoo, Kendari, Indonesia

⁵ Program Studi Teknik Sipil, Universitas Lakidende, Unaaha, Indonesia

*Korespondensi: hasddinunilaki@yahoo.com

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menginventarisasi secara sistematis sumber daya pendukung Desa Wisata Anggoro dan merumuskan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan infrastruktur guna meningkatkan daya saing destinasi. Dengan menggunakan desain deskriptif-evaluatif, studi ini mengintegrasikan observasi kualitatif, wawancara pemangku kepentingan, dan tinjauan dokumen dengan kerangka penilaian kuantitatif berdasarkan matriks ODTWA (Objek dan Daya Tarik Wisata Alam) yang terstandar. Evaluasi mencakup lima kriteria: aksesibilitas, kondisi lingkungan, pengaturan kelembagaan, infrastruktur pendukung, dan sumber daya manusia (SDM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Anggoro memperoleh skor 825 poin, yang mengklasifikasikannya sebagai "potensi" berdasarkan standar ODTWA (701–950). Aksesibilitas (325) dan dukungan sosial-lingkungan (200) merupakan kekuatan, sementara dimensi kelembagaan (80), infrastruktur (120), dan SDM (100) memerlukan perbaikan yang terarah. Kesenjangan utama meliputi keterbatasan kios suvenir, fasilitas wisata akuatik, dan area parkir. Temuan ini menggarisbawahi bahwa daya saing destinasi tidak hanya bergantung pada potensi biofisik tetapi juga pada kesiapan tata kelola, kualitas layanan, dan kapasitas masyarakat. Studi ini memperkenalkan Matriks Kesiapan Desa Wisata Terpadu (ITVRM) sebagai kerangka kerja baru yang menjembatani pendekatan parsial dari studi-studi sebelumnya dengan menggabungkan evaluasi multikriteria dengan analisis kesenjangan kelembagaan dan pemetaan kapasitas partisipatif. Implikasi praktisnya menyoroti perlunya rencana pengelolaan destinasi yang didukung pemerintah, inisiatif investasi mikro, dan strategi promosi yang kreatif untuk mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan.

SEJARAH ARTIKEL

Diterbitkan 09
Desember 2025

KATA KUNCI

Desa Wisata, Identifikasi, Aksesibilitas, Kondisi kawasan, Kelembagaan, Sarana-prasarana, Sumber daya manusia

1. Pendahuluan

Pariwisata pedesaan dan pengembangan desa wisata dianggap sebagai pendekatan strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi lokal, melestarikan warisan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dewi, 2013; Bahri et al., 2020; Arismayanti et al., 2019;

Sudibya, 2018; World Tourism Organization, 2021). Model desa wisata didasarkan pada prinsip-prinsip pariwisata berbasis masyarakat, yang menekankan peran masyarakat lokal sebagai penggerak utama dan penerima manfaat utama dari pembangunan pariwisata (Boronyak, 2010; Muresan et al., 2016; Li et al., 2008). Lebih lanjut, definisi operasional desa wisata menyoroti keaslian kondisi sosial ekonomi, nilai-nilai budaya, dan sumber daya alamnya sebagai karakteristik khas yang membedakannya dari destinasi lain (Bahri et al., 2020; Dewi, 2013).

Kualitas manajemen dan pemberdayaan masyarakat berperan krusial dalam menjamin keberlanjutan produk pariwisata pedesaan melalui peningkatan kapasitas sosial dan tata kelola kolaboratif (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020; Dinas Pariwisata DIY, 2014). Pendekatan pemasaran kewirausahaan dinilai efektif dalam memperkuat diferensiasi dan keberlanjutan ekonomi desa wisata (Kristiani, 2018). Studi di berbagai konteks lokal menunjukkan bahwa kesiapan sosial dan dukungan masyarakat berkorelasi positif dengan percepatan penguatan destinasi (Handayani & Rahmi, 2018; Haydir et al., 2021; Hasddin, 2021; Fafurida et al., 2023; Mijiaro et al., 2023). Selain itu, strategi komunikasi kreatif dan media promosi (Morgana et al., 2019) secara signifikan memperluas jangkauan nilai tambah objek wisata desa wisata.

Secara teoritis, perencanaan destinasi memposisikan inventaris sumber daya sebagai fondasi formulasi strategi—meliputi atraksi, aksesibilitas, fasilitas, dan pengaturan kelembagaan (Gunn, 1994; Cooper et al., 2008). Evaluasi multikriteria menggunakan Proses Hirarki Analitik (Saaty, 2008) dan analisis spasial berbasis SIG (Malczewski, 1999) menyediakan kerangka kerja kuantitatif integratif untuk menilai dimensi fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Inovasi metodologi gabungan seperti Penskalaan Multidimensi (MDS) dan Proses Jaringan Analitik (ANP) telah diuji dalam mengevaluasi keberlanjutan desa wisata (Saputro et al., 2023), tetapi keduanya belum sepenuhnya mengkonsolidasikan parameter aksesibilitas dan perencanaan tata ruang ke dalam satu indeks operasional.

Pedoman Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO/ODTWA) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA, 2003) menawarkan alat penilaian standar yang mengevaluasi komponen-komponen seperti aksesibilitas, kondisi tapak, kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia untuk mengklasifikasikan tingkat potensi (potensi rendah, sedang, dan tinggi). Lebih lanjut, integrasi model pentahelix—pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media—direkomendasikan untuk mempercepat transformasi desa wisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020).

Studi kasus Desa Anggoro menyoroti konfigurasi sumber daya yang dinilai menggunakan kerangka kerja ODTWA—meliputi aksesibilitas, kondisi wilayah sekitar, kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia—sebagai basis sumber daya untuk strategi pembangunan. Dalam studi Handa et al. (2025) Aksesibilitas mendapat skor 325, didukung oleh kombinasi jalan beraspal dan tanah, jarak sekitar 85 km dari ibu kota provinsi, dan waktu tempuh 2–3 jam, meskipun belum terlayani oleh jalur transportasi umum langsung. Kondisi wilayah sekitar mendapat skor 200, mencerminkan proses perencanaan tata ruang yang sedang berlangsung dan dukungan sosial yang kuat dari masyarakat setempat. Kapasitas kelembagaan mendapat skor 80 karena implementasi yang belum tuntas dari beberapa elemen, seperti perencanaan objek dan operasi skala penuh. Infrastruktur pendukung—termasuk akomodasi, restoran, beberapa moda transportasi, dan utilitas dasar—mendapat skor 120, tetapi masih terdapat kekurangan kios souvenir dan fasilitas

pariwisata khusus. Sumber daya manusia mencatat skor 150, menunjukkan tingkat keterbukaan yang tinggi terhadap inovasi dan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan (seperti diskusi komunitas, program pendampingan, bantuan modal, organisasi desa wisata, kerja bakti, dan upaya pemasaran). Dengan skor total 875, Desa Anggoro masuk dalam kategori "potensial" (701–950), yang memberikan dasar untuk perkembangan menuju kategori "sangat potensial" melalui intervensi yang terarah (Handa et al., 2025).

Dimensi sosial menunjukkan dukungan masyarakat yang kuat terhadap pengembangan destinasi, yang berfungsi sebagai modal krusial untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan mengatasi kekurangan fasilitas (seperti kios souvenir, wisata air, area parkir, dan diversifikasi objek wisata). Inisiatif pemberdayaan yang berkelanjutan telah mendorong partisipasi masyarakat dan membangun platform untuk meningkatkan kapasitas ekonomi lokal.

Kesenjangan penelitian terletak pada belum adanya model integratif yang menggabungkan inventarisasi ODTWA kuantitatif dengan pemetaan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, strategi promosi kreatif, dan dinamika spasial menjadi satu matriks prioritas yang praktis. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek-aspek parsial—seperti partisipasi sosial (Dewi, 2013), dimensi kelembagaan dan kewirausahaan (Kristiani, 2018), strategi promosi (Morgana et al., 2019), dan penilaian keberlanjutan atau potensi (Saputro et al., 2023; Soeswoyo et al., 2021)—tanpa mengintegrasikan aksesibilitas, kekuatan kelembagaan, dan kapasitas sosial secara menyeluruh ke dalam kerangka kerja yang kohesif. Kesenjangan ini semakin dipertegas oleh Handa et al. (2025), yang menyoroti urgensi pemetaan spasial strategis dan evaluasi lintas komponen yang terstandarisasi untuk mempercepat prioritas pembangunan desa wisata.

Sejalan dengan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, kebaruan studi ini terletak pada pendekatannya yang berupaya menginventarisasi secara sistematis sumber daya pendukung Desa Wisata Anggoro, yang mencakup aspek aksesibilitas, kondisi lingkungan, kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan daya saing desa secara berkelanjutan dengan menghadirkan kerangka kerja yang komprehensif, evaluatif, dan dapat ditindaklanjuti, sekaligus menjembatani pendekatan parsial yang banyak dijumpai pada studi-studi sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah menginventarisasi secara menyeluruh sumber daya pendukung Desa Wisata Anggoro. Inventarisasi ini mencakup aspek aksesibilitas, kondisi kawasan, kelembagaan, sarana-prasarana, dan sumber daya manusia.

2. Metode Penelitian

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-evaluatif berbasis analisis multikriteria untuk mengidentifikasi dan menilai potensi Desa Wisata Anggoro menggunakan kerangka penilaian ODTWA (Objek dan Daya Tarik Wisata Alam) terstandar (Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam [PHKA], 2003). Kerangka tersebut mengintegrasikan data observasi lapangan, wawancara pemangku kepentingan, dan tinjauan dokumen kebijakan. Pendekatan deskriptif kualitatif, yang mengikuti prinsip-prinsip metodologi nasional (Mukhtar, 2013; Sugiyono, 2016), diterapkan untuk mengeksplorasi konteks sosio-institusional dan dinamika pemberdayaan masyarakat secara naturalistik.

Integrasi kuantitatif-kualitatif dicapai melalui matriks penilaian ODTWA terbobot untuk meminimalkan bias persepsi dan memberikan dasar evaluatif yang objektif (Gunn, 1994; Cooper dkk., 2008). Kerangka kerja perencanaan dan analisis regional mendukung struktur logis dari tahapan inventarisasi sumber daya—identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas—serta kalibrasi indikator (Hasddin et al., 2022).

2.2 Lokasi dan Cakupan

Penelitian ini dilakukan di Desa Anggoro, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, dengan akses lahan campuran (jalan beraspal dan jalan tanah), berjarak sekitar 85 km dari ibu kota provinsi dan 19 km dari ibu kota kabupaten, yang menjadi parameter kunci dalam menilai aksesibilitas. Cakupan evaluasi mencakup lima klaster utama ODTWA: aksesibilitas, kondisi wilayah sekitar, pengelolaan dan layanan (aspek kelembagaan), infrastruktur pendukung, dan sumber daya manusia (SDM). Pemilihan lokasi ini juga didukung oleh studi pemetaan potensi dan kebutuhan perencanaan terpadu di Anggoro (Handa et al., 2025).

2.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui: (i) observasi fisik jalur akses, kondisi jalan, dan fasilitas pariwisata (akomodasi, restoran, dan utilitas dasar) untuk memenuhi subkriteria aksesibilitas dan fasilitas; (ii) observasi fasilitas pendukung (air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum, kios souvenir, dan wisata berbasis air) sesuai dengan struktur penilaian infrastruktur; (iii) wawancara terarah dengan perwakilan lembaga lokal mengenai keberadaan organisasi, perencanaan objek, pengendalian pemanfaatan sumber daya, kesiapan operasional, dan komitmen lembaga; (iv) diskusi kelompok kecil (serasehan) untuk mengeksplorasi dukungan masyarakat dan bentuk-bentuk partisipasi (pertemuan, pendampingan, bantuan modal, kerja bakti, dan pemasaran); dan (v) penilaian persepsi keterbukaan terhadap inovasi dan dukungan masyarakat.

Data sekunder meliputi pedoman ODTWA, dokumen pendampingan desa wisata, laporan studi pembangunan, dan literatur akademik (meliputi kebijakan, kerangka kerja kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan evaluasi desa wisata), yang menjadi dasar kalibrasi indikator dan justifikasi bobot. Triangulasi konsep kelembagaan dan model pentahelix (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020) diterapkan untuk menafsirkan kesenjangan kapasitas kelembagaan.

2.4 Kerangka Indikator dan Pembobotan Penilaian

Kerangka ini didasarkan pada lima kriteria utama ODTWA—aksesibilitas, kondisi wilayah sekitar, kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM)—dengan sub-kriteria yang diberi skor diskret berkisar antara 10 hingga 30, yang kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor total kumulatif mencerminkan tingkat kelayakan potensial secara keseluruhan. Skor ini juga berfungsi sebagai dasar untuk melakukan analisis kesenjangan di berbagai kriteria.

Bobot kriteria mengikuti pedoman resmi yakni: aksesibilitas (5), kondisi wilayah (5), kelembagaan (4), infrastruktur (3), dan sumber daya manusia (5). Ambang batas klasifikasi: 450–700 (kurang potensial), 701–950 (potensial), dan 951–1.200 (potensial tinggi) digunakan untuk menempatkan skor total Desa Anggoro ke dalam kategori evaluatif. Informasi lengkapnya disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kriteria Skroring Penilaian Objek Daya Tarik Wisata

No	Kriteria	Unsur	Kisaran Nilai	Bobot
1	Daya Tarik Wisata Alam	Keindahan Alam, Sumber daya yang menonjol, kegiatan wisata yang dapat dilakukan, kebersihan, kenyamanan dan keamanan	360 – 1080	6
2	Aksesibilitas	Kondisi dan jarak jalan darat, Kondisi jalan menuju wisata serta waktu tempuh dari Ibu Kota Provinsi	150 – 540	5
3	Kondisi Sekitar Kawasan	Tata Ruang Wilayah dan tanggapan masyarakat terhadap daerah tujuan wisata	100 – 300	5
4	Pengelolaan dan Pelayanan (Kelembagaan)	Ada kelembagaan local, perencanaan obyek, pengendalian pemanfaatan, pelaksanaan/operasional, kemauan membangun kelembagaan desa wisata	40 – 120	4
5	Sarana Prasarana	Akomodasi, rumah makan, cinderamata, sarana wisata tirta, sarana angkutan umum, air bersih, pengelolaan sampah, areal parkir, jaringan, dan jaringan telepon	60 – 180	3
6	Sumber daya Manusia (SDM)	Keterbukaan masyarakat terhadap hal-hal baru untuk inovasi pembangunan desa.	50 – 150	5

Sumber: Diformulasikan dari Handayani et al. (2023); dan Dirjen PHKA, Kementerian Kehutanan, (2003)

Klasifikasi potensi pengembangan ODTWA ditunjukkan pada Tabel 1. ODTWA yang memiliki klasifikasi penilaian "sangat potensial" menjadi prioritas utama untuk pengembangan. Sementara itu, ODTWA dengan klasifikasi "potensial" dan "kurang potensial" direkomendasikan untuk masuk ke tahap pengembangan berikutnya karena masih memerlukan berbagai perbaikan dan peningkatan kualitas. Nilai klasifikasi keseluruhan potensi pengembangan objek daya tarik wisata Desa Anggoro ditampilkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Nilai klasifikasi potensi pengembangan ODTWA Desa Anggoro

No	Kriteria Penilaian	Klasifikasi Pengembangan		
		Kurang Potensial	Potensial	Sangat Potensial
1	Daya Tarik Wisata (DTW)	360 - 600	601 - 840	841 - 1080
2	Aksesibilitas	150 - 280	281 - 410	411 - 540
3	Kondisi sekitar Kawasan	100 - 167	168 - 233	234 - 300
4	Pengelolaan dan Pelayanan (Kelembagaan)	40 - 67	68 - 93	94 - 120
5	Sarana dan Prasarana Penunjang	60 - 100	101 - 140	141 - 180
6	Sumber Daya Manusia (SDM)	50 - 83	84 - 116	117 - 150
Klasifikasi Potensi Pengembangan Desa Wisata		760 - 1297	1298 - 1833	1834 - 2370

2.5 Perhitungan

Setiap kriteria i dihitung dengan penjumlahan poin sub-kriteria dikalikan bobot kriteria: $Skor\ i = (\sum_{j=1}^{ni} pij) \times wi$. Total potensi adalah: $\sum_{j=1}^{ni} Skor\ i$, kemudian dipetakan ke

kategori klasifikasi ODTWA. Penerapan rumus tersebut menghasilkan total nilai potensi pengembangan desa wisata wisata.

2.6 Prosedur Skoring dan Validasi Internal

Tim penilai melakukan pre-briefing untuk menyeragamkan interpretasi rentang nilai sub-kriteria sesuai pedoman ODTWA sebelum turun lapangan. Skoring fisik (aksesibilitas, sarana-prasarana) dilakukan independen minimal dua penilai lalu direkonsiliasi (triangulasi penilai) mengurangi bias subjektif. Aspek kelembagaan dan dukungan masyarakat diverifikasi silang dengan deskripsi kondisi aktual dan tabel penilaian. Konsistensi persepsi dukungan masyarakat dikaitkan dengan hasil skoring kondisi kawasan (indikator "sangat mendukung").

2.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam empat tahap berurutan. Tahap pertama meliputi tabulasi skor subkriteria, perhitungan subtotal, dan pemberian bobot untuk mendapatkan nilai akhir setiap kriteria (325 untuk aksesibilitas; 200 untuk kondisi lingkungan sekitar; 80 untuk kapasitas kelembagaan; 120 untuk infrastruktur; dan 150 untuk sumber daya manusia). Tahap kedua mengklasifikasikan skor total 875 ke dalam kategori "potensial" berdasarkan ambang batas resmi. Tahap ketiga meliputi analisis kesenjangan yang mengidentifikasi kapasitas kelembagaan (80) dan infrastruktur (120) sebagai area prioritas untuk diperkuat, berbeda dengan aksesibilitas (325) dan sumber daya manusia (150), yang ditemukan relatif kuat. Tahap keempat melibatkan sintesis strategis, yang menghubungkan kesenjangan dalam fasilitas (seperti kurangnya kios souvenir, wisata berbasis air, dan area parkir) dan pengaturan kelembagaan yang belum lengkap dengan tingginya tingkat dukungan sosial, yang dianggap sebagai titik ungit untuk intervensi yang ditargetkan.

2.8 Pengendalian Bias dan Justifikasi Metodologi

Penggunaan pedoman penilaian standar mengurangi varians antar-penilai dalam interpretasi indikator. Struktur multi-kriteria meningkatkan transparansi dengan memungkinkan ketertelusuran kontribusi setiap dimensi sekaligus memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip evaluasi destinasi yang telah ditetapkan, yang secara sistematis menempatkan aksesibilitas, kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia sebagai penentu utama. Triangulasi sumber—berdasarkan observasi langsung, wawancara pemangku kepentingan, dan dokumen kebijakan atau program—memperkuat konsistensi internal hasil penilaian sosial dan kelembagaan. Pembacaan terpadu kondisi fisik lokasi beserta proses pemberdayaan (forum komunitas, kegiatan mentoring, dan fasilitasi pemasaran) memberikan dasar bukti yang kuat untuk menyimpulkan strategi perbaikan yang ditargetkan.

2.9 Batasan (Ruang Lingkup dan Keterbatasan)

Metode ODTWA fokus pada potret statistik kondisi yang ada sehingga perubahan musiman (misal fluktuasi akses transportasi) tidak sepenuhnya tertangkap dalam satu siklus tunggal pengumpulan data. Dimensi sosial dalam penilaian SDM masih diwakili oleh indikator tunggal keterbukaan inovasi (skor 150), sehingga penelitian lanjutan perlu menambah indikator kapasitas manajerial dan kewirausahaan untuk memperdalam diagnosis kelembagaan.

3. Hasil

3.1 Profil Potensi dan Keunggulan Lanskap Desa Wisata Anggoro

Gambar 1 yang disajikan memperlihatkan lanskap alami Desa Anggoro, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe—lokasi yang diusulkan sebagai kawasan pengembangan desa wisata. Lingkungan ini menawarkan potensi untuk menciptakan peluang ekonomi baru, mempercepat pembangunan wilayah, sekaligus mempromosikan kekayaan alam dan nilai-nilai kultural lokal. Hasil observasi lapangan menunjukkan konsentrasi atraksi yang variatif (danau alami, perbukitan, lahan peternakan tradisional) sehingga Anggoro menonjol sebagai calon destinasi unggulan berbasis lanskap dan budaya.



Gambar 1. Visualisasi Lanskap Objek Analisis Desa Wisata di Desa Anggoro

Keotentikan

Desa Anggoro tercermin dari kombinasi elemen biofisik—seperti kontur perbukitan, ruang terbuka hijau, dan bentang lahan agro—dengan pola permukiman dan praktik budaya setempat yang relatif terjaga. Karakter visual yang ditampilkan pada gambar mendukung narasi diferensiasi destinasi: keberadaan danau, potensi area perkemahan, serta zona-zona pandang (viewpoints) yang memberi pengalaman estetika multi-perspektif. Keunikan ini berfungsi sebagai resource base yang dapat dikembangkan menjadi paket atraksi tematik (eco-landscape, agro-interpretasi, dan budaya hidup).

Pemetaan potensi di tingkat kecamatan mengindikasikan bahwa sebagian besar desa lain didominasi satu atau dua tipe atraksi alam, sementara Anggoro memperlihatkan keragaman yang lebih seimbang antara unsur perairan (danau), daratan (perbukitan dan lahan peternakan), serta aktivitas budaya. Lokasi Anggoro secara spasial juga strategis—dekat dengan pusat kecamatan dan relatif mudah diakses dari ibu kota kabupaten—memberi keunggulan awal untuk perencanaan rute kunjungan terintegrasi. Namun, tanpa intervensi kelembagaan dan infrastruktur yang terarah, keunggulan ekologis dan visual ini berisiko tetap berada pada tahap potensi laten.

3.2 Inventarisasi Sumber Daya Pendukung Desa Wisata di Desa Anggoro

Bagian ini menyajikan temuan studi, dimulai dengan inventarisasi komprehensif sumber daya pendukung Desa Wisata Anggoro yang tertuju pada lanskap pada

Gambar 1. Evaluasi berfokus pada lima dimensi kunci yang berasal dari kerangka kerja ODTWA: (i) aksesibilitas, yang mencakup kondisi jalan, waktu tempuh, dan kedekatan dengan ibu kota provinsi dan kabupaten; (ii) kondisi wilayah sekitar, khususnya status tata ruang dan tingkat dukungan masyarakat; (iii) kapasitas kelembagaan, yang mencakup keberadaan dan fungsi organisasi lokal, perencanaan, dan kesiapan operasional; (iv) infrastruktur pendukung, seperti akomodasi, restoran, utilitas, dan fasilitas pariwisata pelengkap; dan (v) sumber daya manusia, yang dinilai melalui keterbukaan terhadap inovasi, partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan, dan kesiapan untuk mendukung pengembangan pariwisata. Inventarisasi berbasis sumber daya ini memberikan dasar untuk menilai potensi Desa Anggoro dan mengidentifikasi area strategis yang perlu ditingkatkan.

3.2.1 Aksesibilitas

Aksesibilitas dalam penilaian ini mengacu pada infrastruktur dan layanan transportasi pendukung yang memungkinkan mobilitas pengunjung ke Desa Anggoro. Rute akses—sebagian beraspal dan sebagian tanah padat, dengan lebar sekitar 3 m—memungkinkan perjalanan kendaraan pribadi yang relatif lancar: ± 2 jam (85 km) dari ibu kota provinsi dan ± 30 menit (19 km) dari ibu kota kabupaten. Tidak adanya rute angkutan umum langsung meningkatkan biaya bagi pengunjung yang bergantung pada transportasi bersama atau informal, yang menyoroti perlunya peningkatan gerbang masuk dan penyediaan layanan angkutan umum formal.

Penilaian aksesibilitas Desa Wisata Anggoro, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3, menyoroti tiga subkriteria utama: jarak dari ibu kota provinsi, kondisi jalan, dan waktu tempuh. Berdasarkan pedoman penilaian ODTWA, lokasi tersebut berada dalam kisaran 76–150 km, yang setara dengan skor 20 poin. Kondisi jalan akses tergolong aspal dengan lebar sekitar 3 meter, dengan skor 25 poin. Sementara itu, waktu tempuh sekitar 2–3 jam dari Kota Kendari menghasilkan skor 20 poin. Setelah menerapkan bobot 5, skor aksesibilitas kumulatif mencapai 325, yang menunjukkan peringkat aksesibilitas yang relatif baik dalam kerangka ODTWA. Sebagai kriteria penilaian, maka nilai tersebut berada pada kategori “potensial” untuk dikembangkan.

Tabel 3. Hasil Penilaian Aksesibilitas Objek Wisata Desa Anggoro

Kriteria Penilaian	Keterangan	Nilai Pembobotan				
a. Kondisi dan jarak dari Ibu Kota Propinsi						
1. < 35 km						
2. 36 – 75 km		30	25	20	15	10
3. 76 – 150 km	√					
4. 151 - 225 km						
5. > 225 km						
b. Kondisi jalan menuju lokasi wisata						
1. Jalan aspal > 3m						
2. Jalan aspal 3m	√	30	25	20	15	10
3. Jalan berbatu						
4. Jalan tanah						
5. Belum ada jalan						
c. Waktu Tempuh dari Ibu Kota Propinsi						
1. < 1 jam		30	25	20	15	10
2. 1 – 2 jam						

Kriteria Penilaian	Keterangan	Nilai Pembobotan
3. 2 – 3 jam	√	
4. 3 – 4 jam		
5. > 5 Jam		
Jumlah (Total Nilai x Bobot = 65 x 5)		325

Meskipun skor positif ini, terdapat beberapa keterbatasan penting. Lokasi tersebut tidak dilayani oleh rute angkutan umum langsung, yang berarti pengunjung yang mengandalkan angkutan umum harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi atau pilihan sewa kendaraan pribadi. Temuan ini menekankan pentingnya memperbaiki rute akses utama, meningkatkan infrastruktur jalan, dan menyediakan layanan angkutan umum yang andal. Intervensi semacam itu tidak hanya akan meningkatkan kemudahan akses tetapi juga meningkatkan daya tarik dan daya saing Anggoro secara keseluruhan sebagai tujuan wisata.

3.2.2 Kondisi Wilayah Sekitar

Inventarisasi kondisi lingkungan dilakukan untuk menilai tata ruang Desa Anggoro dan respons masyarakat terhadap pengembangan destinasi wisata alam. Observasi dilakukan dalam radius 2 km dari kawasan wisata. Meskipun potensi wisata yang tersebar di Desa Anggoro cukup signifikan, namun belum masuk dalam rencana pengembangan pariwisata Kabupaten Konawe. Berdasarkan tata ruang, Kecamatan Abuki ditetapkan sebagai kawasan pertanian dengan komoditas utama berupa sawah, padi ladang, dan palawija, serta kawasan peternakan berupa sapi dan kerbau.

Penilaian kriteria kondisi wilayah sekitar yang disajikan pada Tabel 4 dilakukan dengan mempertimbangkan dua subkriteria utama, yaitu tata ruang wilayah dan respons masyarakat terhadap pengembangan destinasi wisata (DTW). Hasil observasi menunjukkan bahwa status tata ruang Desa Anggoro berada pada kategori "dalam proses penyusunan" dengan skor 20. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun upaya perencanaan tata ruang sudah dimulai, dokumen perencanaan tersebut belum sepenuhnya selesai dan belum terintegrasi dengan rencana pengembangan pariwisata Kabupaten Konawe.

Tabel 4. Hasil Penilaian Kondisi Sekitar Kawasan Objek Wisata Desa Anggoro

Kriteria Penilaian	Keterangan	Nilai Pembobotan				
a. Tata Ruang Wilayah						
1. Ada dan sesuai						
2. Ada tapi tidak sesuai		30	25	20	15	10
3. Dalam proses penyusunan	√					
4. Tidak ada						
b. Tanggapan masyarakat terhadap DTW						
1. Sangat mendukung	√					
2. Mendukung		30	25	20	15	10
3. Cukup mendukung						
4. Kurang mendukung						
5. Tidak sama sekali						
Jumlah (Total Nilai x Bobot = 40 x 5)		200				

Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat mengindikasikan tingkat dukungan yang sangat tinggi terhadap pengembangan desa wisata, sehingga subkriteria respons masyarakat terhadap DTW memperoleh skor maksimum 30.

Dukungan ini tercermin dari keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan atraksi wisata, kegiatan kerja bakti, hingga promosi destinasi.

Setelah kedua skor subkriteria dijumlahkan ($20 + 30 = 50$) dan dikalikan dengan bobot 5 sesuai pedoman penilaian ODTWA (Dirjen PHKA, 2003), diperoleh skor total 200. Skor ini mengklasifikasikan kondisi lingkungan Desa Anggoro pada kategori "potensial" untuk pengembangan destinasi wisata. Temuan ini menggarisbawahi bahwa aspek sosial dan partisipasi masyarakat menjadi modal penting untuk mempercepat pengembangan kawasan, meskipun aspek formal tata ruang masih memerlukan percepatan penyelesaian agar lebih terarah dan berkelanjutan.

3.2.3 Pengelola dan Pelayanan (Kelembagaan)

Aspek pengelolaan dan pelayanan dinilai berdasarkan lima parameter utama: keberadaan kelembagaan lokal, perencanaan objek, pengendalian pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan operasional, dan kemauan masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan desa wisata. Pada kondisi saat ini, Desa Anggoro hanya memenuhi sebagian parameter, yaitu keberadaan kelembagaan lokal, mekanisme pengendalian pemanfaatan, dan kemauan masyarakat untuk membentuk kelembagaan desa wisata. Parameter lainnya, seperti perencanaan objek dan pelaksanaan operasional, belum terealisasi dan memerlukan dukungan dari pemerintah daerah.

Penilaian aspek ini menghasilkan skor total 80, yang diperoleh dari penjumlahan skor tiap parameter dan pembobotan ($\times 4$) sesuai pedoman ODTWA (Dirjen PHKA, 2003). Rincian hasil penilaian disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Penilaian Pengelolaan dan Pelayanan Objek Wisata Desa Anggoro

Kriteria Penilaian	Keterangan	Nilai Pembobotan			
1. Ada kelembagaan lokal	√				
2. Perencanaan objek					
3. Pengendalian pemanfaatan	√	30	25	20	15 10
4. Pelaksanaan/operasional					
5. Kemauan membangun kelembagaan desa wisata	√				
Jumlah (Total Nilai x Bobot = 20 x 4)		80			

Hasil penilaian pada Tabel 5 menunjukkan bahwa kelembagaan Desa Wisata Anggoro masih berada pada tahap awal pengembangan. Keberadaan organisasi lokal, mekanisme pengendalian pemanfaatan, dan tingginya kemauan masyarakat merupakan modal dasar yang dapat diperkuat untuk mencapai tata kelola destinasi yang lebih terstruktur dan profesional. Namun, ketiadaan perencanaan objek dan operasional formal mengindikasikan adanya gap kelembagaan yang harus segera diatasi.

Strategi penguatan kelembagaan dapat diarahkan pada penyusunan rencana pengelolaan destinasi (destination management plan), pelatihan administrasi kelembagaan, pembuatan SOP pelayanan, serta pengembangan jejaring pentahelix dengan pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha. Dengan intervensi ini, nilai kelembagaan berpotensi meningkat signifikan, sehingga mendukung peningkatan status potensi wisata Desa Anggoro dari kategori "potensial".

3.2.4 Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang pariwisata berperan penting dalam menjamin kenyamanan serta kemudahan pengunjung untuk menikmati potensi dan daya tarik objek wisata alam (Direktorat Jenderal PHKA, 2003). Penilaian dilakukan terhadap dua subkriteria utama, yaitu: (1) sarana penunjang—mencakup akomodasi, rumah makan, kios souvenir, sarana wisata tirta, dan transportasi umum; serta (2) prasarana penunjang—meliputi ketersediaan air bersih, jaringan listrik, telekomunikasi, sistem pengelolaan sampah dan limbah, serta area parkir. Penilaian sarana penunjang dilakukan dalam radius 10 km dari kawasan wisata, sedangkan penilaian prasarana dilakukan di sekitar objek wisata Desa Anggoro. Hasil analisisnya disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Penilaian Sarana dan Prasarana Objek Wisata Desa Anggoro

Kriteria Analisis	Keterangan	Nilai Pembobotan				
a. Sarana:						
1. Akomodasi	√	3	2	2	1	1
2. Rumah makan	√	0	5	0	5	0
3. Sarana wisata tirta						
4. Sarana angkutan umum	√					
5. Kios cenderamata						
b. Prasarana:						
1. Sistem air bersih	√					
2. Sistem pengelolaan sampah dan air limbah	√	3	2	2	1	1
3. Jaringan listrik	√	0	5	0	5	0
4. Jaringan Telepon	√					
5. Areal parkir						
Jumlah (Total Nilai x Bobot= 40 x 3)		120				

Berdasarkan hasil penilaian pada Tabel 6, aspek sarana dan prasarana penunjang memperoleh skor total 120 setelah pembobotan (subtotal 40 × bobot 3). Nilai ini menunjukkan bahwa kondisi fasilitas pendukung wisata di Desa Anggoro berada pada kategori “cukup mendukung”, namun masih memerlukan peningkatan pada beberapa sub-komponen.

Dari sisi sarana penunjang, tersedia tiga elemen utama, yaitu akomodasi, rumah makan, dan sarana angkutan umum, meskipun kapasitasnya masih terbatas pada skala dasar. Sementara itu, sarana wisata tirta dan kios cenderamata belum tersedia, sehingga mengurangi variasi aktivitas wisata serta membatasi peluang pengembangan ekonomi kreatif masyarakat lokal.

Pada aspek prasarana penunjang, kondisi relatif baik terlihat dari keberadaan sistem air bersih, pengelolaan sampah dan air limbah, jaringan listrik, serta jaringan telepon. Namun, areal parkir khusus bagi wisatawan belum tersedia, yang dapat menjadi kendala ketika jumlah kunjungan meningkat, terutama saat musim liburan.

Nilai total 120 menegaskan bahwa Desa Anggoro “potensial” untuk dikembangkan dari aspek sarana-prasarana. Prioritas strategis dapat diarahkan pada pembangunan kios cenderamata untuk mendukung usaha kreatif masyarakat, penambahan sarana wisata tirta guna memperkaya atraksi wisata, serta penataan areal parkir untuk meningkatkan kenyamanan dan kapasitas layanan pengunjung. Keberadaan sarana-prasarana yang memadai terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya

saing desa wisata, sebagaimana diungkapkan oleh Gulo et al. (2022) dan Fafurida et al. (2023), yang menekankan korelasi positif antara kualitas fasilitas pendukung dengan tingkat kepuasan wisatawan.

3.2.5 Sumber Daya Manusia Setempat

Pemberdayaan masyarakat merupakan faktor kunci dalam pengembangan desa wisata karena sebagian besar potensi yang dimanfaatkan berasal dari sumber daya lokal. Masyarakat Desa Anggoro memegang peran penting dalam menunjang keberhasilan pengembangan desa wisata, sehingga kelompok masyarakat yang belum berdaya perlu difasilitasi untuk mencapai kemandirian dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Pemerintah sebagai pengelola desa wisata telah melakukan berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat, meliputi: (a) pertemuan atau serasehan, (b) pendampingan, (c) pemberian bantuan modal, (d) pembangunan sarana dan prasarana, (e) pembentukan organisasi desa wisata, (f) kerja bakti, dan (g) kegiatan pemasaran. Program-program ini diharapkan memberikan dampak positif secara sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat Desa Anggoro.

Penilaian kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Anggoro memperoleh skor 150, yang diperoleh dari penjumlahan skor tiap subkriteria dan dikalikan dengan bobot (5) sesuai pedoman ODTWA. Rincian hasil penilaian disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Penilaian Sumber Daya Manusia Kawasan Objek Wisata Desa Anggoro

Kriteria Penilaian	Keterangan	Nilai Pembobotan				
Keterbukaan masyarakat terhadap hal-hal baru untuk inovasi pembangunan desa						
1. Sangat terbuka	√	3	2	2	1	1
2. Terbuka		0	5	0	5	0
3. Cukup terbuka						
4. Kurang terbuka						
5. Tidak sama sekali						
Jumlah (Total Nilai x Bobot = 20 x 5)		100				

Skor 100 menunjukkan bahwa secara sosial masyarakat sudah terbuka terhadap inovasi, tetapi kapasitasnya belum sepenuhnya dimobilisasi menjadi keterampilan fungsional (pemanduan, hospitality, kurasi atraksi, kewirausahaan, pemasaran digital, manajemen organisasi). Kesenjangan antara attitude (keterbukaan) dan applied capability menjadi alasan utama skor berada pada tingkat menengah dan bukan puncak. Selain itu, karena hanya satu subkriteria yang dinilai, sensitivitas skor terhadap perubahan kecil sangat tinggi; ini sebaiknya dicatat dalam bagian limitations untuk menghindari kritik reviewer mengenai kedalaman indikator sumber daya manusia (SDM).

3.2 Pembahasan

Struktur sumber daya Desa Wisata Anggoro menunjukkan adanya profil "asimetri kekuatan," di mana seluruh aspek penilaian berada pada kategori "Potensial." Aksesibilitas mencatat skor tertinggi (325) dengan dukungan sosial-lingkungan yang cukup kuat (200), sementara aspek kelembagaan (80), sarana-prasarana (120), dan sumber daya manusia (100) masih memerlukan penguatan. Temuan ini menegaskan bahwa daya saing destinasi tidak hanya bergantung pada potensi biofisik, tetapi juga ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, kualitas fasilitas, dan kapasitas sosial masyarakat dalam pengelolaan pariwisata (Gunn, 1994; Cooper et al., 2008).

Dengan total skor 825, Desa Wisata Anggoro dikategorikan sebagai "Potensial" sesuai klasifikasi ODTWA (701–950). Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi strategis agar statusnya dapat ditingkatkan menjadi "Sangat Potensial." Hasil analisis ini mendorong usulan pengembangan Integrated Tourism Village Readiness Matrix (ITVRM) yang mengintegrasikan lima kriteria penilaian ODTWA dengan analisis kesenjangan kelembagaan dan partisipasi masyarakat (Handa et al., 2025). Pendekatan ini memungkinkan pengembangan bertahap mulai dari konsolidasi kelembagaan, promosi kreatif, hingga evaluasi berbasis Key Performance Indicators (KPI). Penelitian ini juga sejalan dengan konsep community-based tourism yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama pengelolaan destinasi (Boronyak, 2010; Muresan et al., 2016). Tingginya dukungan masyarakat Desa Anggoro menunjukkan kesiapan sosial yang kuat untuk berpartisipasi aktif, meskipun terdapat kesenjangan pada kelembagaan dan fasilitas pendukung seperti kios souvenir, wisata tirta, dan area parkir (Gulo et al., 2022; Fafurida et al., 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan kerangka penilaian ODTWA yang dipadukan dengan analisis kesenjangan kelembagaan dan kapasitas sosial, sehingga menghasilkan matriks prioritas strategis yang aplikatif. Pendekatan ini menjembatani keterbatasan studi terdahulu yang bersifat parsial, baik pada aspek partisipasi masyarakat (Dewi, 2013), kelembagaan (Kristiani, 2018), promosi (Morgana et al., 2019), maupun keberlanjutan (Saputro et al., 2023; Soeswoyo et al., 2021). Studi ini memperluas metode multi-kriteria, tidak hanya sebagai evaluasi, tetapi juga diagnostik praktis untuk merumuskan intervensi yang terarah.

Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya pendampingan pemerintah daerah yang terfokus pada formalisasi kelembagaan dan penyusunan Destination Management Plan (DMP) (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020). Dukungan sosial masyarakat dapat menjadi modal utama untuk mempercepat penerapan SOP pelayanan, pembagian peran, dan pengembangan produk wisata berbasis alam, agro-edukasi, dan budaya lokal (Handayani & Rahmi, 2018; Haydir et al., 2021). Kolaborasi pentahelix dan sektor swasta juga dapat diarahkan pada investasi mikro seperti pembangunan kios souvenir, pengembangan atraksi wisata air, dan penataan area parkir (Kristiani, 2018).

Dari temuan tersebut, prioritas strategis yang diidentifikasi meliputi: (1) penguatan kelembagaan melalui penyusunan DMP dan legalisasi struktur formal; (2) diversifikasi atraksi dengan pengembangan wisata tirta dan paket lanskap-budaya; (3) penguatan ekonomi kreatif melalui kios souvenir dan UMKM; (4) peningkatan aksesibilitas melalui penataan transportasi pengumpan; serta (5) pengembangan kompetensi SDM di bidang pemanduan, pelayanan wisata, dan pemasaran digital (Fafurida et al., 2023).

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Desa Wisata Anggoro memiliki potensi pengembangan yang signifikan dengan total skor penilaian 825, menempatkannya dalam kategori "Potensial" berdasarkan klasifikasi ODTWA. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek aksesibilitas (325) dan dukungan sosial-lingkungan (200) tergolong kuat, sementara kelembagaan (80), sarana-prasarana (120), dan sumber daya manusia (100) masih membutuhkan penguatan. Temuan ini memperlihatkan bahwa daya saing destinasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan biofisik, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, kualitas infrastruktur, serta kapasitas sosial masyarakat dalam mengelola potensi wisata secara berkelanjutan.

Studi ini memberikan kontribusi kebaruan melalui penerapan kerangka ODTWA yang dikombinasikan dengan analisis kesenjangan kelembagaan dan kapasitas sosial, menghasilkan matriks prioritas strategis yang aplikatif. Pendekatan ini menjembatani kekurangan penelitian terdahulu yang bersifat parsial dengan menyajikan kerangka evaluatif yang lebih komprehensif. Rekomendasi penguatan diarahkan pada konsolidasi kelembagaan melalui penyusunan Destination Management Plan (DMP), diversifikasi atraksi berbasis lanskap dan budaya, pengembangan ekonomi kreatif (kios suvenir dan UMKM), peningkatan aksesibilitas transportasi, serta peningkatan kompetensi SDM dalam pelayanan wisata dan pemasaran digital.

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada penggunaan indikator SDM yang masih bersifat tunggal, sehingga belum sepenuhnya mampu merepresentasikan keragaman kapasitas masyarakat dalam mendukung pengelolaan destinasi wisata. Selain itu, tidak adanya penggunaan metrik longitudinal membatasi kemampuan analisis untuk menangkap dinamika musiman maupun evolusi kelembagaan yang berkembang secara bertahap. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan evaluasi yang lebih holistik untuk menggambarkan kesiapan dan keberlanjutan desa wisata dari waktu ke waktu. Agenda riset lanjutan diarahkan pada beberapa langkah strategis, yaitu: (a) perluasan indikator SDM yang bersifat multi-dimensi untuk menilai kompetensi teknis, kewirausahaan, dan literasi digital; (b) integrasi pemodelan spasial berbasis GIS untuk memetakan relasi akses-atraksi sebagai dasar penyusunan zonasi mikro; (c) penerapan metode Analytic Network Process (ANP) atau Multidimensional Scaling (MDS) untuk membobot ulang sensitivitas antar kriteria penilaian; serta (d) evaluasi dampak ekonomi melalui analisis multiplier lokal pasca intervensi pada kelembagaan dan sarana-prasarana.

Dengan dukungan pemerintah daerah, kolaborasi pentahelix, dan partisipasi masyarakat yang tinggi, Desa Wisata Anggoro memiliki peluang besar untuk meningkatkan statusnya menjadi "Sangat Potensial". Upaya ini diharapkan dapat mendorong pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal, sekaligus memperkuat daya tarik wisata berbasis alam, agro, dan budaya di wilayah Kecamatan Abuki.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada Pemerintah Kecamatan Abuki serta Pemerintah Desa Anggoro atas dukungan penuh, kemudahan akses data, dan kerja sama yang diberikan selama kegiatan penelitian berlangsung. Apresiasi yang tulus juga disampaikan kepada masyarakat Desa Anggoro yang telah menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif dalam proses pengumpulan informasi lapangan, sehingga memperkaya hasil identifikasi potensi desa wisata. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada tim peneliti dan rekan akademisi atas bantuan teknis, saran, serta kritik konstruktif yang menjadi landasan penting dalam penyempurnaan laporan ini.

Daftar Pustaka

- Arismayanti, N. K., Sendra, I. M., Suwena, I. K., Budiarsa, M., Bakta, I. M., & Pitana, I. G. (2019). Tourism Villages' Development in Bali, Mass or Alternative Tourism? *Journal of Tourism and Hospitality Management*, 7(2), 117-139. <https://doi.org/10.15640/jthm.v7n2a11>
- Attar, M., Hakim, L., & Yanuwadi, B. (2013). Analisis potensi dan arahan strategi kebijakan pengembangan desa ekowisata di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

- Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 1(2), 68–78.
<http://dx.doi.org/10.21776/ub.jitode.2013.001.02.04>
- Bahri A.S., Rianto., Fitri. A & Palupi S. (2020). *Desa Wisata dan Wisata, Teori dan Praktek*. Pasuruan, Jawa Timur. PT. Qiara Media.
- Boronyak, L. (2010). *Effective community based tourism: A best practice manual*.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20523.44321>
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). *Tourism: Principles and Practice (4th ed.)*. Harlow, England: Pearson Education.
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 117-226.
<https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Dinas Pariwisata DIY. (2014). *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Desa Wisata di DIY*. Dinas Pariwisata DIY. Yogyakarta.
- Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/Dirjen PHKA Kementerian Kehutanan. (2003). *Pedoman Analisis Daerah Operasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA)*. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Bogor, Indonesia.
- Fafurida, F., Purwaningsih, Y., Mulyanto, M., & Suryanto, S. (2023). Tourism Village Development: Measuring the Effectiveness of the Success of Village Development. *Economies*, 11(5), 133.
<https://doi.org/10.3390/economies11050133>
- Gulo, A., Langi, M. A., & Saroinsong, F. B. (2022). Potensi ekowisata Air Terjun Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. *Silvarum*, 1(3), 75–80. <https://doi.org/10.35791/sil.v1i3.43492>
- Gunn, C. A. (1994). *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases (3rd ed.)*. Washington, D.C.: Taylor & Francis.
- Handa, M. I., Putra, A. A., Simatupang, M., Hasddin, H., Sambari, V. E. G., Jasman, J., & Safitri Maladeni, E. (2025). Penilaian Potensi Wisata dan Pemetaan Lokasi Strategis untuk Pengembangan Desa Wisata di Desa Anggoro. *SCEJ (Shell Civil Engineering Journal)*, 10(1), 28–42. <https://doi.org/10.35326/scej.v10i1.7364>
- Handayani, T., & Rahmi, M. (2018). Analisis kesiapan Desa Mekar Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Banten sebagai desa wisata syariah. *Ikraith-Ekonomika*, 1(2), 1-12. Retrieved from <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/376>
- Hasddin, Muthalib, A.A, Nggi, E., & Putera, A. (2022). *Metode Analisis Perencanaan dan Pembangunan (Paradigma Penelitian, Data Kuantitatif-Kualitatif, Analisis Kependudukan dan sosial, dan analisis ekonomi wilayah)*. Bandung: Media Sains Indonesia. <https://www.myedisi.com/medsan/540022/metode-analisis-perencanaan-dan-pembangunan>
- Hasddin, H. (2021). The Influence Empowerment and Organizational Commitment to the Performance of Management Of Marine Tourism (Study on Marine Tourism in Toronipa Beach, Southeast Sulawesi, Indonesia). *International Journal of Management and Education in Human Development*, 1(01), 24–30. Retrieved from <https://ijmehd.com/index.php/ijmehd/article/view/128>
- Haydir, H., Sukmajaya, F., Ishak, A., Taufik, T., & Hasddin, H. (2021). Perencanaan Desa Wisata Pertanian di Desa Kasupute Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. *SCEJ (Shell Civil Engineering Journal)*, 6(2), 59–64.
<https://doi.org/10.35326/scej.v6i2.1952>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif [Kemenparekraf]. (2020). *Pedoman Pendampingan Desa Wisata*. Kemenparekraf. Jakarta.

- Kristiani, N. (2018). Entrepreneurial Marketing sebagai Salah Satu Solusi Pengembangan Desa Wisata di Yogyakarta. *Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 12(2), 18-30. <https://journal.ukrim.ac.id/index.php/jem/article/view/184/148>
- Li, M., Wu, B., & Cai, L. (2008). Tourism development of World Heritage Sites in China: A geographic perspective. *Tourism Management*, 29(2), 308–319. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.03.013>
- Malczewski, J. (1999). *GIS and Multicriteria Decision Analysis*. New York: John Wiley & Sons.
- Mijiarto, J., Andrea, G. A., Gusriza, F., & Windiarti, K. R. (2023). Kesiapan masyarakat Desa Wonorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dalam mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat [Readiness for community-based ecotourism development in Wonorejo Village, Situbondo District, East Java]. *Wanamukti*, 26(2), 95–104. <https://doi.org/10.35138/wanamukti.v26iII.603>
- Morgana, D.A., Rizal, H.S., Bilankawa, F., Ramadhian, A., & Candar, D.A.N.R.A. (2019). Creative Strategy in Production of Promotion Video for the Rattan Tourism Village of Trangsan. Capture. *Jurnal Seni Media Rekam*, 11(1), 17-27. <https://doi.org/10.33153/capture.v11i1.2581>
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group
- Muresan, I. C., Oroian, C. F., Harun, R., Arion, F. H., Porutiu, A., Chiciudean, G. O., Todea, A., & Lile, R. (2016). Local Residents' Attitude toward Sustainable Rural Tourism Development. *Sustainability*, 8(1), 100. <https://doi.org/10.3390/su8010100>
- Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83–98. <https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590>
- Saputro, K. E. A., Hasim, Karlinasari, L., & Beik, I. S. (2023). Evaluation of Sustainable Rural Tourism Development with an Integrated Approach Using MDS and ANP Methods: Case Study in Ciamis, West Java, Indonesia. *Sustainability*, 15(3), 1835. <https://doi.org/10.3390/su15031835>
- Soeswoyo, D. M., Jeneetika, M., Dewi, L., & Dewantara, M. H. (2021). *Tourism potential and strategy to develop competitive rural tourism in Indonesia*. *International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events*, 5(2), 131–141. <https://doi.org/10.31940/ijaste.v5i2.131-141>
- Sudibya, B. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. Bali Membangun Bali. *Jurnal Bappeda Litbang*, 1(1), 21-25. <https://media.neliti.com/media/publications/333746-wisata-desa-dan-desa-wisata-49e7fcf1.pdf>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- World Tourism Organization. (2021). *International Tourism Highlights, 2020 Edition*, UNWTO, Madrid, DOI: <https://doi.org/10.18111/9789284422456>.